

Efektivitas Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama' Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Abdul Kharis Kurniawan¹ Ach. Ilyasi²
Universitas Islam Jember, Indonesia
*Corresponding author email: abdulcharisk978@gmail.com

Article info

Article history:
Received : 20 Juni 2024
Accepted : 27 Juni 2024
Published : 28 Juni 2024

Keywords:
efektivitas;
governance; program
Indonesia pintar

Abstrak

Salah satu program dukungan pemerintah pada bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) masih dapat dikategorikan sebagai program yang belum mampu berjalan dengan maksimal, karena sasaran program yang diberikan tidak tepat pada sasarannya serta rendahnya kesadaran orang tua akan fungsi dan kegunaannya program ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas dari teori James L. Gibson efektivitas didasarkan pada lima aspek yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi mencapai tujuan, perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *governance*. Konsep pemerintahan disini dapat dikategorikan sebagai konsep lama dalam administrasi *public*, dimana teori tersebut hanya menekankan pada pemerintahannya sebagai satu-satunya pengatur dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kajian tersebut mulai muncul konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa yang menjalani proses penerimaan Program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang menjalani proses penerimaan Program Indonesia Pintar.

Hasil temuan yang di dapatkan dalam penelitian menunjukkan bahwa tujuan program Indonesia Pintar di di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sudah sesuai pada tujuannya.

Implementasi program indonesia pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dapaat dikatakan sudah cukup baik dari segi pelaksanaannya serta baik dari aspek-aspek implementasinya, akan tetapi masih terdapat beberapa

kekurangan dari segi komunikasi atau sosialisasi yang diberikan oleh lembaga kepada calon penerimanya. Hal itulah yang perlu dilakukan perbaikan lagi. Dilahat dari segi faktor pendukungnya proses pelaksanaan program ini adanya informasi secara online dari pihak dinas pendidikan kepada kepala sekolah dan operator sekolah sangatlah membantu untuk percepatan informasi yang diterima. Dengan memanfaatkan informasi online, program Indonesia Pintar dapat lebih efektif untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang perlu bersekolah. Meningkatkan keterlibatan sekolah dalam pengawasan terkait pengalokasian dana program Indonesia pintar yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan siswa dalam pendidikan sangatlah tujuan utama, namun hambatan terkait program belum adanya perncanaan bagaimana dana akan digunakan, orang tua siswa sebagai pemegang kendali atas dana tersebut, dan sekolah mengalami kesulitan dalam proses pengawasannya.

DOI:

Abstract

One of the government support programs in the education sector is the Smart Indonesia Program (PIP). The Smart Indonesia Program (PIP) can still be categorized as a program that has not been able to run optimally, because the program targets given are not on target and parents have low awareness of the function and use of this program.

In this study, researchers used the theory of effectiveness from James L. Gibson's theory. Effectiveness is based on five aspects, namely clarity of goals to be achieved, clarity of strategies to achieve goals, careful planning and appropriate program preparation, availability of facilities and infrastructure, and educational supervision and control systems. .

The grand theory used in this research is governance. The concept of government here can be categorized as an old concept in public administration, where the theory only emphasizes the government as the sole regulator and implementer of government administration. Based on this study, the concept of governance began to emerge which replaced the concept of government in aspects and studies of government.

The research method used in this research is a qualitative research method. So this research uses observation, interviews and documentation methods in the data collection process. The population of this study were all students who underwent the Smart Indonesia Program acceptance process at SD NU 09 Riyadlatul Uqul, Ampel Village, Wuluhan District, Jember Regency. The sample taken in this research were all students who underwent the Smart Indonesia Program acceptance process.

The findings obtained in the research show that the objectives of the Smart Indonesia program at SD NU 09 Riyadlatul Uqul, Ampel Village, Wuluhan District, Jember Regency are in accordance with their objectives.

The implementation of the Smart Indonesia program at SD NU 09 Riyadlatul Uqul, Ampel Village, Wuluhan District, Jember Regency, can

be said to be quite good in terms of implementation and good in terms of implementation aspects, however there are still several shortcomings in terms of communication or socialization provided by the institution to potential recipients. . This is something that needs to be improved again. Looking at the supporting factors in the process of implementing this program, online information from the education office to school principals and school operators is very helpful in accelerating the information received. By utilizing online information, the Smart Indonesia program can be more effective in achieving its goal of increasing access to education for students who need to go to school. Increasing the involvement of schools in monitoring the allocation of funds for the Smart Indonesia program which aims to meet students' educational needs is the main goal, however the obstacles related to the program are that there is no planning for how the funds will be used, parents of students are in control of the funds, and schools are experiencing difficulties in monitoring process.

PENDAHULUAN

Istilah “efektif” berawal dari kata dalam bahasa Inggris “effective,” dengan makna segala sesuatu yang mencapai kesuksesan atau segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik. Dalam konteks ilmiah, efektivitas diartikan sebagai akurasi dalam memanfaatkan hasil yang ada untuk mendukung pencapaian suatu tujuan. Istilah Efektivitas dapat dimaknai dengan arti sebuah tingkat pengukuran tercapainya sebuah target yang telah di tentukan pada sebelumnya. Efektivitas juga dinilai sebagai indikator sebuah keberhasilan dari aspek tercapai atau tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan efektif bila mana hasil yang diperoleh mendekati sasaran yang di telah di tetapkan atau dengan kata lain bila mana hasil yang diperoleh mendekati sasaran berarti semakin tinggi pula efektifitasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Sebuah tindakan dianggap efektif jika mencapai tujuan yang diinginkan secara ideal. Dengan demikian efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dari sudut pandang tercapai atau tidaknya sebuah sasaran yang telah ditetapkan diawal. Jika hasilnya mendekati sasaran maka tinggi tingkat keefektifitasannya, sebaliknya hasilnya jauh dengan sasaran berarti tingkat keefektifitasannya masih dalam kategori rendah atau kurang.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun keluarga produktif melalui pelaksanaan tiga program utama: Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Instruksi ini mengarahkan kepada kepala pemerintah daerah, kepala lembaga negara, dan para menteri untuk menjalankan program-program tersebut. Inpres tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan KEMNDIKBUD RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Peraturan KEMNDIKBUD RI Nomor 12 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan KEMNDIKBUD RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) merupakan program bantuan pemberian dalam bentuk tabungan dari Pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada golongan keluarga miskin atau kurang mampu. Program ini memberikan bantuan sejumlah Rp. 200.000 per keluarga per bulan selama 8 bulan kepada sekitar 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Tujuan dari PSKS adalah untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin, serta membangun keluarga yang produktif.

Program Indonesia Sehat (PIS) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini terdiri dari tiga pilar utama:

1. Paradigma Sehat: Mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas kesehatan diri dan keluarga.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer: Memperkuat sistem pelayanan kesehatan di tingkat pertama, terutama di puskesmas dan klinik.
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Menyediakan jaminan Kesehatan untuk seluruh warga negara Indonesia.

PIS dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Program ini juga mencakup pendekatan keluarga, dimana tenaga kesehatan mengunjungi setiap keluarga untuk mengidentifikasi dan menangani permasalahan kesehatan secara lebih spesifik.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah diterbitkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan dan menyalurkan bantuan PIP bagi Kementerian, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat. PIP Dikdasmen berupaya membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu secara ekonomi dengan biaya pendidikan pribadinya untuk:

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada anak-anak berusia enam hingga dua puluh satu tahun, sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan hingga kelulusan. satuan pendidikan menengah untuk memfasilitasi penerapan pendidikan wajib dua belas tahun (atau menengah universal).
2. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena kesulitan keuangan.
3. Menarik anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Program Indonesia Pintar diartikan sebagai “Bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya”.

Peningkatan pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia sebuah negara. Pendidikan berperan vital dalam pembentukan karakter dan kepribadian, serta mengikuti evolusi zaman. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk mengasah kemampuan, membina karakter yang baik, dan mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang beriman, beretika, berpengetahuan, inovatif, independen, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Saat ini banyak anak sekolah terpaksa bekerja karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga mereka harus bekerja di usia yang masih muda. Pemerintah, melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar, berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah dan mengejar aspirasi mereka.

Dinas Pendidikan memiliki kewenangan dalam proses verifikasi atas usulan PIP dari sekolah sesuai dengan kuota yang disediakan pemerintah pusat. Program Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih sering ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah berhenti sekolah karena terhalang biaya. Kebijakan PIP dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala dari segi distribusi maupun pemanfaatan. Terdapat ketidak tepatan sasaran dalam mendistribusikan dana PIP. Seperti halnya siswa dari sosial ekonomi tinggi mendapatkan PIP, sedangkan siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak mendapatkan PIP. Selain itu, dalam proses pencairan dana, siswa yang seharusnya memperoleh PIP namun ketika di cek masih kosong.

Masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Misalnya, sejumlah besar individu dan lembaga pendidikan masih belum mengetahui keberadaan program ini dan tidak yakin bagaimana mengusulkan atau melaksanakannya, sehingga memerlukan sosialisasi yang ekstensif dan efisien. agar masyarakat umum dapat memahami tujuan, kelebihan, dan cara pembuatan proposal. Keterlambatan penyerahan uang PIP juga sering terjadi karena pihak sekolah tidak segera memberitahukan kepada penerima manfaat. Bantuan keuangan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan setiap siswa; orang tua masih bertanggung jawab untuk menanggung pengeluaran tunjangan sekolah. Dalam hal pengasawan, penggunaan dana PIP yang semestinya dipergunakan untuk keperluan sekolah namun masih ada yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Program Indonesia Pintar tergolong pada kebijakan publik dalam bidang pendidikan, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga publik guna untuk memecahkan suatu masalah, kebijakan publik dapat mencakup beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan masih banyak lagi. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program kebijakan publik dalam bidang pendidikan, dalam hal ini penelitian ingin melihat dan mengukur keberhasilan efektivitas dalam Program Indonesia Pintar (PIP).

Lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama' di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember salah satunya adalah SD NU 09 Riyadlatul Uqul. Lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan yang beralamatkan di Dusun Kepel Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. SD NU 09 Riyadlatul Uqul merukan salah satu lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Ma'arif (YASPIDARMA) yang berdiri sejak 1960 dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2023 – 2024 sebanyak 115 siswa. Terdapat beberapa beasiswa yang di berikan oleh lembaga, baik beasiswa dari lembaga itu sendiri maupun beasiswa pemerintah Salah satu beasiswa tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP).

Penyaluran dana PIP juga sering terjadi keterlambatan yang dikarenakan pihak sekolah tidak segera menginformasikan kepada penerima. Bantuan biaya yang diterima tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan siswa, masih ada biaya penunjang sekolah yang harus dikeluarkan oleh orangtua. Dalam hal pengasawan, penggunaan dana PIP yang semestinya dipergunakan untuk keperluan sekolah namun masih ada yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana analisis dan efektivitas Program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul .

KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

Governance

Konsep “*governance*” berawal dari istilah kata “*government*”. *Government* atau pemerintah mengacu pada lembaga atau kelompok yang memegang otoritas resmi dalam suatu negara. Pada hakikatnya didalamnya menekankan pada pemerintah (lembaga/lembaga pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang eksklusif, maka gagasan pemerintah ini boleh jadi dianggap ketinggalan jaman dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, gagasan mengenai tata pemerintahan berkembang dan akhirnya menggantikan gagasan tentang pemerintahan dalam bidang dan kajian yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain itu, kata *governance* berasal dari kata “*govern*” yang berarti memiliki posisi yang lebih luas dan mencakup semua prosedur, undang-undang, dan lembaga yang memungkinkan melakukan proses pengelolaan dan pengendalian terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam arti luas, tata kelola merujuk pada keseluruhan seluruh lembaga dan komponen masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015).

Menurut Sedarmayanti (2004), gagasan mendasar dibalik perbedaan antara pola pemerintahan tradisional dan konsep *governance* adalah adanya pengurangan tuntutan terhadap pemerintahan yang sangat kuat dan peran masyarakat (baik dalam bidang usaha dan organisasi-organisasi non pemerintah) untuk mengurangi peran pemerintah. ditingkatkan dan dibuat lebih mudah diakses.

Sesuai dengan rencana strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000–2004, diperlukan pendekatan baru terhadap penyelenggaraan negara dan pembangunan dalam menggapai sebuah tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pendekatan baru ini harus menjadi “proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis dan profesional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan desentralisasi hak asasi manusia.” Pemerintahan juga harus bersifat partisipatif, transparan, adil, bersih, dan akuntabel, serta efisien, efektif, dan fokus pada peningkatan daya saing negara (Sedarmayanti, 2004).

Dengan mendefinisikan ulang *governance* dan *government* secara berbeda, Leach dan Percy Smith dalam Hetifah menyatakan bahwa *government* terdiri dari politisi dan pejabat pemerintah lainnya yang bertindak, mengatur, dan memberikan pelayanan, sedangkan komponen negara lainnya bersifat pasif. Sementara *governance* meleburkan

maknanya, dengan menciptakan elastisitas kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut berubah memiliki tanggungjawab terhadap peranan dan andil dari bagian *Government* (Hetifah, 2009).

Good Governance

Governance dapat dilihat sebagai proses manajemen, administrasi, pembinaan, bimbingan, dan manajemen. Dapat dikatakan bahwa metode ini menunjukkan tata kelola yang efektif jika komponen-komponen tersebut berhasil diterapkan. Menurut Rohman et al., (2019) *Good governance* mengacu pada kerangka kerja yang mengatur suatu pemerintahan dengan mengkaji interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta atau bisnis. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai fundamental seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokrasi. Pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan penerimaan masyarakat dianggap menjalankan pemerintahan yang baik, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Dalam sistem institusi, kebijakan, dan cita-cita yang dikenal sebagai tata kelola, permasalahan sosial, politik, dan ekonomi dipengaruhi dan dikelola oleh interaksi antara ranah publik, swasta, dan pemerintahan. Ketika bekerja dengan semua sektor publik, keterbukaan, transparansi, dan prinsip-prinsip moral mendapat prioritas dalam sistem nilai, kebijakan, dan institusi yang dikenal sebagai istilah *Good Governance*. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Keputusan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik secara akuntabel. Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah awal serta tolak ukur instansi/lembaga pemerintah dalam rangka membenahi sistem pemerintahan yang sebelumnya dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan. Dalam rangka menyempurnakan sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai sistem pemerintahan, hal ini dapat dipandang sebagai langkah awal dan standar bagi lembaga dan organisasi pemerintah. Siregar (2022) mengidentifikasi sejumlah kekurangan pada kondisi pelayanan publik saat ini, antara lain: kurang efisien; kurang tanggap; kurang informatif; aksesibilitas yang lebih rendah; kurang koordinasi; kurang birokratis dan aspiratif dalam mendengarkan keprihatinan, rekomendasi, dan ambisi masyarakat; dan kurang koordinasi.

Tujuan *Good Governance* adalah menetapkan kerangka politik yang memungkinkan semua pihak terkait bekerja sama untuk secara kooperatif menjaga kepentingan pelayanan publik secara seimbang (negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta). Menurut Sinambela (2008) Apabila pemerintah dan lembaga publik lainnya dapat peka terhadap kebutuhan masyarakat dan reseptif terhadap gagasan-gagasan baru, maka tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud. Jika masyarakat mendapat informasi lengkap mengenai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan, maka daya tanggap akan meningkat. Berdasarkan pandangan beberapa

ahli, dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang stabil, akuntabel, efisien, dan berhasil dengan menjaga keterkaitan berbagai sumber daya di ranah publik, swasta, dan kemasyarakatan.

Menurut Ni Putu Tirka Widanti (2022) *governance* berdasarkan perspektif pelayanan publik harus memenuhi empat unsur utama, yaitu:

- 1) Akuntabilitas: pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambalnya;
- 2) Transparansi: baik di tingkat nasional maupun daerah, pemerintahan yang efektif akan bersifat terbuka dan jujur terhadap para konstituennya;
- 3) Transparansi: seruan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menanggapi dan mengkritik aspek-aspek pemerintahan yang mereka anggap buram;
- 4) Supremasi hukum: tata kelola yang kompeten menjamin persepsi masyarakat mengenai keadilan dan kepastian hukum sehubungan dengan semua kebijakan publik.

Efektivitas

Menurut Ravianto (2014:11) Efektivitas diartikan sebagai seberapa baik pekerjaan dilakukan dan seberapa banyak produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Artinya suatu tugas dikatakan efektif bila dapat diselesaikan sesuai jadwal, sesuai anggaran, tepat waktu, dan bermutu. Dalam bentuknya yang paling mendasar, efektivitas adalah penyaluran aktivitas individu dengan hasil yang diinginkan. Tentu saja, seseorang dapat menggunakan kesesuaian ini dan menghasilkan formula kemanjuran. Dengan demikian, efektivitas dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik suatu tujuan telah dicapai. Jika suatu upaya mencapai tujuannya dengan sempurna, maka upaya tersebut dapat dianggap efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dengan menunjukkan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Menurut Pasolong (2013:51), dalam bukunya *Kepemimpinan Birokrasi* adalah : Efektivitas adalah ungkapan yang mengacu pada hubungan sebab-akibat, dan pada dasarnya berasal dari kata "akibat". Seseorang mungkin menganggap efektivitas sebagai penyebab faktor-faktor lain. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan kata lain, fakta bahwa proses kegiatan itulah yang memungkinkan tercapainya target.

Menurut Sedarmayanti (2006:61), Menurut bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia*, efektivitas adalah metrik yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Menurut sudut pandang ini, efektivitas adalah metrik yang menunjukkan seberapa dekat suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan awalnya. Hal ini memainkan peran penting dalam semua lembaga dan organisasi dan membantu dalam mengukur pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai oleh lembaga-lembaga tersebut.

Menurut Effendy (2003:14) efektivitas adalah sebagai berikut: Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut Mahmudi dalam Oktania (2010,143-166) dalam bukunya *Manajemen Efektivitas* menurutnya dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* adalah sejauh mana unit-unit yang dihasilkan mampu mencapai tujuan. Kaitan antara hasil pemungutan pajak dan tujuan yang dinyatakan diukur dengan menggunakan efektivitas.

Pendapat Drucker yang dikutip Moenir (2006:166). dalam bukunya manajemen umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.

Menurut James L. Gibson Dalam (Himmah Faiqotul, 2021) mengatakan bahwa efektivitas program dapat diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja memenuhi tanggung jawab mereka dan mencapai tujuan dan target mereka.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Untuk mencegah para pelaksana mengalami disorientasi ketika bekerja menuju tujuan organisasi, strategi berada “di jalur” yang diikuti ketika melakukan upaya berbeda untuk mencapai target yang telah ditentukan.
3. Perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat pada dasarnya mencakup pemilihan hari ini apa yang akan dicapai organisasi di masa depan dan menggabungkan perencanaan yang cermat dengan persiapan program. Pelaksana tidak akan memiliki arahan untuk tindakan atau pekerjaan di masa depan jika persiapan program tidak dilakukan dengan benar.
4. Tersedianya sarana dan prasarana. Kapasitas tenaga kerja produktif merupakan salah satu ukuran keberhasilan. memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas yang mungkin disediakan atau disediakan oleh organisasi.
5. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Pembentukan sistem pemantauan dan pengendalian pendidikan diperlukan untuk efektivitas program karena sifat manusia bisa salah.

Peneliti melakukan kajian pada judul ini hanya dengan menggunakan 5 dimensi, menggabungkan perencanaan yang matang dan persiapan program yang memadai ke dalam 1 dimensi. Hal ini dilakukan sesuai dengan teori James L. Gibson yang menyatakan bahwa efektivitas dapat ditentukan dengan memeriksa 6 dimensi. Kelima faktor tersebut yakni kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicanangkan pemerintah Indonesia memberikan bantuan keuangan, perluasan jangkauan, dan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan secara ekonomi dalam upaya membantu pendidikan mereka. PIP dimaksudkan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah, berisiko rendah, atau prioritas dalam menerima layanan pendidikan hingga lulus. Ini mencakup paket non-formal A sampai C dan pendidikan khusus, serta kursus formal sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah kejuruan. Pemerintah berharap dengan menawarkan program ini, anak-anak akan terhindar dari kemungkinan berhenti sekolah dan mendorong mereka yang sudah berhenti sekolah untuk menyelesaikan studinya. Selain itu, Program Indonesia Pintar PIP diharapkan dapat menurunkan biaya pendidikan individu siswa—baik belanja langsung maupun tidak langsung.

I. Efektivitas Program Indonesia Pintar

Komponen mendasar dari setiap organisasi, kegiatan, dan program yang membantu masyarakat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan adalah efektivitas. Ketika suatu tujuan atau sasaran tercapai sebagaimana dimaksud, itu dianggap efektif. Hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dan tujuan yang harus dicapai adalah hal yang menentukan efektivitasnya. Suatu unit dapat dianggap lebih efektif jika produksinya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap nilai pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Sufiati et al. (2021) efektivitas adalah ketercapaian suatu tujuan yang diwujudkan oleh sebuah organisasi. Efektivitas dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Angelina et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran efektivitas dapat dikategorikan kedalam lima ukuran, pertama pencapaian tujuan atau hasil, kedua efisiensi, ketiga kepuasan kelompok sasaran, keempat daya tanggap, dan terakhir sistem pemeliharaan. Dan menurut Tanjung et al. (2022). indikator tingkat efektivitas suatu program dapat dilihat dari ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa tujuan dari program Indonesia Pintar adalah membriakan bantuan biaya pendidikan terhadap personal atau siswa yang ada pada ketegori peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya personal yang di maksud dalam pengalokasian dana bantuan PIP meliputi:

- 1) Membeli Alat tulis (buku, pensil, kotak pensil dan alat tulis lainnya);
- 2) Membeli seragam sekolah/sragram ektraskulikuler dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
- 3) Uang transportasi peserta didik baik berngkat maupun pualng sekolah;
- 4) Uang saku peserta didik;
- 5) Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau
- 6) Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

2. Mekanisme Pendistribusian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, Dinas Pendidikan kabupaten/kota menyampaikan usulan calon siswa penerima PIP kepada direktorat teknis, yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi anak penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan menerbitkan surat keputusan (SK).

Kedua, lembaga penyalur melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Tabunganku dan virtual account untuk mendistribusikan daftar penerima Bantuan Siawa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP) dari direktorat teknis yang disebutkan dalam SK tersebut.

Ketiga, untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Keputusan (SK) direktur, direktorat teknis mengirimkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Keempat, pencairan uang ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis lembaga penyalur oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai SP2D. Untuk memindahkan uang langsung dari rekening penyalur ke rekening mahasiswa penerima, direktorat teknis mengirimkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur.

Kelima, Surat Keterangan (SK) penerima dilampirkan oleh direktorat teknis pada pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang daftar siswa penerima. Lembaga penyalur merupakan tempat penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dapat menarik pembayaran BSM/PIPnya.

Keenam, penerima manfaat harus menunjukkan surat keterangan kepala sekolah, fotokopi rapor beserta biodata yang diperlukan, dan kartu tanda penduduk siswa (KTP) agar dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dicairkan. Dalam hal penerima manfaat belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk orang tuanya pada saat menerima pembayaran. Selanjutnya, penerima manfaat membuktikan menerima uang tunai yang diberikan oleh lembaga penyalur.

3. Peruntukan Program Indonesia Pintar

Setiap lembaga pendidikan dan pelatihan serta pemangku kepentingan dapat mengusulkan Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai kriteria tertentu:

1. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Siswa dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Siswa dari keluarga penerima Program Keluarga Sejahtera;
4. Anak yatim piatu, panti sosial, atau santri panti asuhan;
5. Siswa yang terkena dampak bencana alam;
6. Siswa usia sekolah (putus sekolah);
7. Siswa penyandang disabilitas fisik;
8. Peserta kursus atau lembaga pendidikan nonformal.

Siswa mendapatkan bantuan dana dari Program Indonesia Pintar (PIP) setahun sekali untuk membantu biaya pendidikannya. Surat keputusan penerima PIP, virtual account, dan nomor rekening, serta permohonan pencairan dana PIP dari lembaga pendidikan tempat siswa bersekolah, wajib bagi setiap siswa untuk mengambil dana PIP langsung dari lembaga penyalur atau bank yang ditunjuk pemerintah. (Yosevina dkk., 2022).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung

jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya. Penelitian pada Efektivitas Program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar dibawah naungan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama' yang ada di Kabupaten Jember lembaga pendidikan tersebut adalah SD NU 09 Riyadlatul Uqul yang berada di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Dimana lembaga pendidikan tersebut berada dalam Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Ma'arif (YASPIDARMA) yang berdiri sejak 1960 dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2023 – 2024 sebanyak 115 siswa. Terdapat beberapa beasiswa yang di berikan oleh lembaga, baik beasiswa dari lembaga itu sendiri maupun beasiswa pemerintah Salah satu beasiswa tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP).

1.1 Tabel Program Indonesia Pintar (PIP). TA 2023-2024

| No | Rombel | Tahap | Jumlah penerima | SK |
|----|---------|-------|-----------------|----------|
| 1 | Kelas 1 | 48 | 3 Siswa | Nominasi |
| 2 | Kelas 1 | 57 | 1 Siswa | Nominasi |
| 3 | Kelas 1 | 73 | 12 Siswa | Aspirasi |
| 4 | Kelas 2 | 60 | 22 Siswa | Aspirasi |
| 5 | Kelas 3 | 60 | 6 Siswa | Aspirasi |
| 6 | Kelas 4 | 60 | 7 Siswa | Aspirasi |
| 7 | Kelas 5 | 77 | 1 Siswa | Nominasi |

Sumber data : pip.kemdikbud.go.id

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa program Indonesia di SD NU 09 Riyadlatul Uqul memiliki 2 jalur yang berbeda yakni jalur nominasi dan jalur aspirasi (pemberian). Jika dilihat dari jumlahnya jalur aspirasi sangatlah mendominasi jumlah calon penerimanya dibandingkan dengan jalur nominasi.

1. Jalur Nominasi PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan sebuah program Indonesia yang membantu di bidang pendidikan, memiliki prosedur nominasi yang dikenal dengan prosedur Nominasi PIP. Hal ini memerlukan prosedur dimana siswa yang sudah memenuhi syarat yang dicalonkan untuk menerima bantuan keuangan untuk studi mereka namun tidak dapat mengakses uang bantuan karena mereka belum mengaktifkan akun mereka (yaitu, belum memiliki Buku Tabungan). Cetak buku tabungan merupakan proses aktivasi.

Siswa yang belum mempunyai akun SimPel aktif dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK) Pencalonan PIP yang diputuskan oleh Puslapdik berdasarkan tahun keputusan tersebut.

2. Jalur Aspirasi (Pemberian) PIP

Jalur Pemberian PIP adalah Jalur yang diberikan kepada peserta didik yang layak menerima PIP dan sudah mengaktivasi rekeningnya (sudah memiliki buku tabungan), dana bantuan sudah tersedia di rekening. Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP memuat siswa yang telah mempunyai rekening SimPel aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun keputusan.

Banyaknya jalur aspirasi dibandingkan dengan jalur nominasi dalam Program Indonesia Pintar (PIP) mungkin disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Akses yang adil: Jalur aspirasi dapat membantu lebih banyak pelajar dari berbagai daerah dan latar belakang mendapatkan dukungan. Hal ini akan memungkinkan program untuk melayani siswa yang membutuhkan dengan lebih adil.
2. Pendekatan Seleksi yang Lebih Mudah: Dibandingkan dengan metode nominasi, jalur aspirasi memungkinkan calon penerima manfaat untuk mendaftar dengan pendekatan yang lebih sederhana atau mudah.
3. Memenuhi Kebutuhan yang Berbeda: Jalur ambisi dibuat agar lebih mudah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan yang berbeda dari setiap individu, termasuk keadaan keuangan dan kebutuhan unik.

Berdasarkan paparan diatas Peneliti menganalisis dan meneliti terkait Efektivitas Program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, menurut teori efektivitas dari James L. Gibson sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Kejelasan yang dimaksud disini bertujuan untuk mengarahkan proses pelaksanaan program agar mampu mencapai sasaran yang terarah, sesuai dengan pelaksanaan di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Dimana Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk memberikan dukungan kepada siswa yang berasal dari golongan keluarga dengan pendapatan terbatas atau keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka. Bantuan tersebut berupa bantuan uang tunai untuk biaya pendidikan, seperti uang sekolah, uang buku, dan uang saku.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Tujuan utama dari Program Indonesia Pintar (PIP) adalah untuk memberikan dukungan kepada siswa siswi yang berasal dari keluarga dengan pendapatan terbatas atau yang menghadapi kesulitan ekonomi, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka. Tujuan ini jelas dan terfokus pada penyediaan dukungan pendidikan kepada kelompok sasaran yang tepat. Yang dimaksud sasaran pada Program Indonesia Pintar (PIP) ini adalah siswa kurang mampu, siswa yatim piatu, atau siswa dari keluarga kurang mampu. Kriteria itulah yang menjadi target Program Indonesia Pintar (PIP) di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

3. Perencanaan yang Matang dan Penyusunan Program yang Tepat

Dalam Sebuah perencanaan yang baik, perlu adanya menyampaikan atas proses pengelolaan program-program pelaksanaan yang tepat, salah contohnya adalah

dengan mensosialisasikan program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Setiap awal semester ajaran tahun baru, pihak sekolah melakukan pemanggilan seluruh wali murid dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa baru khususnya, tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Disampaikan informasi kepada siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mengenai manfaat, kelayakan, prosedur pendaftaran, dan tata cara setelah dana cair.

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang pendidikan yang diperuntukkan untuk siswa siswi dari golongan keluarga tidak mampu atau rentan terhadap kemiskinan. Diharapkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ini bisa dipergunakan secara bijak oleh wali murid siswa dalam mencukupi kebutuhan dan keperluan sekolah, seperti halnya pembelian seragam sekolah, pembelian alat tulis sekolah, serta kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Tujuan PIP disertai dengan spesifikasi yang jelas tentang bantuan yang akan diberikan, yaitu uang tunai untuk biaya pendidikan seperti uang sekolah, uang buku, dan uang saku. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

5. Sistem Pengawasan

Penting bagi pihak-pihak terkait, seperti sekolah, penerima manfaat, dan masyarakat umum, untuk memahami dengan jelas tujuan PIP dan jenis bantuan yang disediakan. Komunikasi yang efektif akan memastikan pemahaman yang tepat dan dukungan yang maksimal dalam pelaksanaan program. Tujuan utama dari Program Indonesia Pintar (PIP) adalah untuk memberikan dukungan kepada siswa siswi yang berasal dari keluarga dengan pendapatan terbatas atau yang menghadapi kesulitan ekonomi, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka. Sasaran program ini sangat spesifik, yaitu untuk memastikan bahwa kelompok yang dituju mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam bidang pendidikan.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian “Efektivitas Program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” adalah sebagai berikut:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah di sektor pendidikan yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada siswa, dengan tujuan utama untuk menurunkan tingkat putus sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Kebijakan pendidikan ini memegang peranan penting dalam mencapai sebuah visi pendidikan nasional dan merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dibrikan oleh pemerintah dalam proses meningkatkan kebijakan pendidikan yang efektif. Program Indonesia Pintar (PIP) khusus disusun dengan signifikan untuk membantu siswa yang berasal dari golongan keluarga ekonomi lemah atau yang berada di ambang

kemiskinan, sehingga mereka dapat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas yang setara dengan siswa lainnya. Di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Implementasikan program ini telah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala seperti komunikasi yang belum optimal antara wali murid dengan pihak sekolah dan masih minimnya kesadaran orang tua dalam pengelolaan dana PIP. Masalah-masalah tersebut perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas dari Program Indonesia Pintar (PIP) agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa siswi di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Indonesia Pintar di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember termasuk kesiapan orang tua dalam mencairkan dana bantuan namun kurangnya tanggung jawab dalam menyediakan bukti transaksi dari bank kepada sekolah. Hal ini menyulitkan pihak sekolah untuk memverifikasi penggunaan dana tersebut karena sekolah hanya berperan sebagai perantara dan dana langsung diberikan kepada wali murid, selain itu juga beberapa wali murid atau orang tua siswa yang kurang memahami kriteria seleksi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) akan menyuarakan tidak terima dan menimbulkan rasa kecemburuan dikarenakan putra atau putrinya tidak mendapatkan bantuan, mereka hanya melihat bahwa anak mereka tidak mendapatkan bantuan tanpa memahami alasan di balik keputusan tersebut. Namun, faktor yang mendukung adalah adanya informasi dan komunikasi yang baik dari dinas pendidikan setempat yang berperan dalam pelaksanaan program di SD NU 09 Riyadlatul Uqul Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

REFERENSI

Jurnal:

- Al Amroni.(2023). Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Menejemen, dan Akuntansi*. Volume 12(2), 158-163.
- Astuti, Dewi., Febriyanti, Doris., Kariem, & M. Qur'anul. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Pip) Di Kelurahan Tuan Kentang Tahun 2020. *Social and Government*. Vol. 4(3), 249-256.
- Dasor, Wendelinus, Yohanes . (2018). Implementasi Good Governance dalam Manajemen Berbasis Sekolah. *jurnal.unikastpaulus.ac.id*.
- Febrianti, Meliana, Maria. & Priyadi, Patuh, Maswar. (2022). Implementasi Good Governance dan Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Hafrienda., Riyan. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar pada Jenjang SMA Negeri di Kota Bukittinggi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*. Volume 14(2), Hal. 697-706.

- Hasan, Ismail., Agus Widodo., & Suratman. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Indonesia Pintar (Pip) Di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. *Vol. 4: SEMDIKJAR 4*.
- Indriani, Kurnia. (2023). Implementasi Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kepada Siswa SMP Di Kabupaten Bantul. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. Vol 12(1).
- Karmila. (2019). Efektivitas Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Volume 4(4).
- Purnama, Randi., & Izzatusholekha. (2023). Analisis Program Indonesia Pintar Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*. Vol 5(1).
- Putra, Pradana, Iskandar, Agus. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*. Volume 11(2).
- Rakista, Mutiara, Putri. (2020). Implementasi Kebijakan PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 8(2), 224-232.
- Robial, Frangky E. D. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 5 (1).
- Safitri., Andriani., Nita, dkk. (2021). Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Motivasi di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Putri Siti Hajar Bandung. *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*. Vol. 5(1).
- Sari, Purnama, Lia., & Yafiz, Muhammad. (2020). Analisis Program Dinas Perdagangan Kota Medan Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Usaha Tape Di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol.1(2).
- Sobari Suryapermana., Nana., & MochMuizuddin. (2022) Management of the Family Hope Program (PKH) and the Smart Indonesia Program (PIP) in Improving Basic Education Services. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*. Vol.1(2), 115-130.
- Syofyan, Andriani. (2022). Analisis Dampak Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol 5(1).

Sumber Internet

- Caesaria, Sandara Desi. (2021). Kemendikbud Ristek: Ini Dua Kategori Penerima Bantuan PIP. Kompas.com. diakses 11 Maret 2024, from <https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/29/120700171/kemendikbud-ristek--ini-dua-kategori-penerima-bantuan-pip>.
- Nugroho, Dicky Setiawan (2020). Efektivitas Program Rebo Nyunda Di Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. diakses pada 11 Maret 2024, from <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3741/8/UNIKOM>.

Dokumen Resmi Pemerintah

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.